

OPTIMALISASI PERAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DI KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG

Chayriah Cindiati Setiawan
NPP. 29.0533

*Asdaf Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung
Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik*

Email: chayriahcindiatis@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background: Disaster-prone areas usually have many inhabitants. Because disaster-prone areas usually have more potential sources of livelihood. Many people understand that the area is a disaster-prone area, but because the area is their livelihood, many people are willing to take risks whatever happens. In addition, the increasing number of residents every year in the city of Bandar Lampung, resulting in an increasing demand for housing space and causing residents to live in environments that have potential disaster-prone with improvised building materials. **Purpose:** This study has the intention of obtaining a description of how the role of the Department of Housing and Settlement Areas in Natural Disaster Management has been carried out optimally or not. Then find out the factors that become obstacles and the efforts that will be made to create a sustainable city of Bandar Lampung free from natural disasters. **Method:** This study uses a qualitative method with a descriptive approach. The theory used is the optimization theory of Machfud Sidik. Data collection techniques were carried out by observation, interviews, and documentation. **Result:** The result of this research is to describe that the role of the Department of Housing and Settlement Areas has been carried out optimally with several policies and work programs that have been carried out. However, several obstacles were still found, namely regarding the spatial pattern arrangement, namely the not yet optimal Regional Spatial Plan document, the lack of public green open space by 20%. **Conclusion:** the large number of uninhabitable housing, the lack of awareness of housing developers to submit Infrastructure and Utilities, Not yet organized. several outside residential areas (squatter area) on the coastal and river border and the condition of the outer residential area that is not in accordance with the technical provisions of the Regional Spatial Plan.

Keywords : Optimization, Role of the Housing and Settlement Service Office, Natural Disaster Management

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Daerah rawan bencana biasanya banyak penghuninya. Dikarenakan daerah rawan bencana biasanya memiliki sumber potensi lebih dalam mata pencaharian. Banyak masyarakat yang paham daerah tersebut merupakan daerah rawan bencana, tetapi karena daerah tersebut sebagai mata pencahariannya, banyak masyarakat yang berani mengambil risiko apapun yang terjadi. Selain itu, semakin meningkatnya jumlah penduduk setiap tahun di Kota Bandar Lampung, mengakibatkan meningkatnya permintaan akan ruang perumahan dan menyebabkan penduduk tinggal di lingkungan yang mempunyai potensi rawan bencana dengan material bangunan yang seadanya. **Tujuan:** Penelitian ini memiliki maksud untuk memperoleh dekskripsi mengenai bagaimana peran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Penanggulangan Bencana Alam apakah sudah dilaksanakan secara optimal atau belum. Kemudian mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dan upaya yang akan dilakukan untuk menciptakan Kota Bandar Lampung yang berkelanjutan bebas bencana alam. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teori yang digunakan adalah teori Optimalisasi dari Machfud Sidik. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil dari penelitian ini adalah mendeskripsikan bahwa Peran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah dilaksanakan dengan optimal dengan beberapa kebijakan dan program kerja yang telah dilakukan. Namun masih ditemukan beberapa hambatan yaitu mengenai Bidang penataan pola ruang yaitu belum optimalnya dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah, Kurangnya lahan Ruang Terbuka Hijau Publik sebesar 20%. **Kesimpulan:** Masih banyaknya perumahan tidak layak huni, Kurangnya kesadaran pengembang perumahan untuk menyerahkan Prasarana Sarana dan Utilitas , Belum tertatanya beberapa kawasan permukiman luar (squatter area) di sempadan pantai dan sempadan sungai dan Kondisi kawasan permukiman luar yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis Rencana Tata Ruang Wilayah.

Kata kunci : Optimalisasi, Peran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Penanggulangan Bencana Alam

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia berada dalam persilangan dua benua serta dua samudera yang menimbulkan Indonesia rawan terhadap bencana alam. Secara tata letak geologis, Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia serta Lempeng Pasifik yang sangat dinamis serta menyebabkan Indonesia berpotensi terhadap bencana alam seperti gempa, tsunami, dan gerakan tanah/longsor. Selain itu, Indonesia merupakan jalur cincin api (fire ring), sehingga Indonesia terdapat gunung berapi aktif yang sewaktu waktu dapat meletus.

Dalam data demografis, tingginya angka kuantitas penduduk dengan keberagaman budaya, ras, suku, agama maupun kondisi ekonomi dan politik membuat Indonesia kaya dan berpotensi sebagai alat pemicu adanya konflik akibat kemajemukannya. Tingginya jumlah penduduk yang setiap tahun meningkat membuat Indonesia membutuhkan banyak lahan dalam pembangunan khususnya perumahan. Salah satu permasalahan perumahan di Indonesia adalah minimnya pemenuhan kebutuhan rumah terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (Sunarti, 2019).

Daerah rawan bencana biasanya banyak penghuninya, hal ini dikarenakan daerah rawan bencana cenderung nyaman untuk ditinggali (Surono, 2014). Terutama pada kawasan yang berada disekitar gunung api, umumnya memiliki hawa yang sejuk dan tanah yang subur serta mempunyai pemandangan yang indah. Kemudian kawasan rawan gempa bumi biasanya datar dan memiliki tanah yang gembur sehingga mudah diolah, dan bagus untuk tempat bercocok tanam dikarenakan banyaknya air yang meresap. Kawasan rawan longsor biasanya memiliki banyak sumber mata air. Begitupun dengan kawasan yang memiliki potensi bencana alam lainnya. Sehingga banyak masyarakat yang sebenarnya paham wilayah tersebut berpotensi rawan bencana, tetapi mereka tetap memilih tinggal di wilayah tersebut dikarenakan di wilayah atau kawasan tersebut memiliki potensi lebih sebagai mata pencaharian.

Tata ruang adalah segala sesuatu yang didalamnya sebagai tempat keberlangsungan kehidupan manusia sehingga memperlihatkan suatu kegiatan manusia dan aktifitasnya untuk tercapainya tujuan (Wetzling, 1978). Penataan ruang merupakan bentuk mitigasi nonstruktural dalam mengurangi risiko bencana. Dalam dokumen penataan ruang atau disebut juga Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) juga mempunyai program dalam pengurangan risiko bencana structural. Dalam penyelenggaraannya pengurangan risiko bencana dalam tata ruang ini berisi perencanaan yang matang, sehingga permasalahan yang diakibatkan oleh bencana dapat di atasi secara terpadu. Dalam mengatasi permasalahan dalam penanganan risiko bencana berbasis tata ruang diperlukan faktor pendukung yaitu peran pemerintah dalam upaya mengurangi kemungkinan-kemungkinan risiko yang akan terjadi. Karena sesuai dengan fungsi pemerintah yaitu pelayanan, pengaturan, pembangunan dan pemberdayaan

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Indeks bencana alam di Kota Bandar Lampung setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Sejalan dengan meningkatnya bencana alam jumlah penduduk di Kota Bandar Lampung terus mingkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018 indeks bencana longsor pada angka 16.2 sedangkan pada tahun 2020 meningkat sampai pada angka 23.20 naik 7 angka dalam waktu dua tahun adalah kenaikan indeks bencana yang cukup cepat. Daerah rawan bencana biasanya banyak penghuninya, hal ini dikarenakan daerah rawan bencana cenderung nyaman untuk ditinggali (Surono, 2014). Terutama pada kawasan yang berada disekitar gunung api, umumnya memiliki hawa yang sejuk dan tanah yang subur serta mempunyai pemandangan yang indah. Penduduk di Kota Bandar Lampung

semakin tahun semakin meningkat baik pendatang maupun yang menetap dikarenakan adanya arus urbanisasi ke Kota Bandar Lampung. Oleh karena itu banyak daerah rawan bencana yang di jadikan kawasan permukiman untuk warga.

Selain untuk tinggal, daerah tersebut juga memiliki potensi dalam mata pencaharian mereka. Tidak peduli bahaya dan risiko yang dialami ketika terjadi bencana. Pada tahun 2019 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman di Kota Bandar Lampung mempunyai program Rumah Layak Huni, tercatat ada 178 rumah di 3 Kecamatan di Bandar Lampung yang sudah dibedah melalui dana alokasi khusus (DAK). Dengan anggaran setiap rumah diberikan bantuan Rp17,5 juta, rinciannya Rp15 juta untuk pembelian material dan Rp2,5 juta membantu upah tukang. Untuk mempercepat program tersebut peran pemerintah dalam mengoptimalkan ruang tempat tinggal bagi penduduk di Kota Bandar Lampung agar dapat mengurangi risiko yang akan terjadi perlu di percepat. Menurut pendapat dari Machfud Sidik (2001) bahwa optimalisasi harus tercermin pada sistem serta prosedur dan perlu adanya batasan waktu dan penentuan tata cara pelaksana agar optimal dalam mencapai suatu tujuan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Kajian tentang kawasan permukiman di Indoensia sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti yang relevan dengan tema penelitian penulis. Hasil kajian ini akan menunjukkan hal-hal yang diperoleh dari penelitian sebelumnya dan akan dilihat persamaan dan perbedaannya. Dari persamaan dan perbedaan tersebut maka penelitian yang akan dilakukan oleh penulis penting untuk dilakukan guna menjawab permasalahan serta diharapkan dapat memberikan rekomendasi terkait kawasan permukiman di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung. (Ati Widiati, 2008) Aplikasi Manajemen Risiko Bencana Alam Dalam Penataan Ruang Kabupaten Nabire. Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pada penelitian ini mempunyai tujuan yaitu cara untuk mengurangi kemungkinan dalam bahaya dan upaya untuk mengurangi adanya daya rusak suatu bahaya yang tidak dapat dihindari kedatangannya. Hasil Penelitian tersebut yaitu untuk mengantisipasi dan menanggulangi dampak bencana alam juga perlu dikategorikan kedalam salah satu komponen untuk penyusunan RTRW provinsi/kabupaten/kota. Saat ini dalam penyusunan RTRW perlu adanya manajemen resiko yang masuk dalam salah satu komponen penyusunan, maka perlu adanya suatu revisi untuk mengurangi bahaya, mencegah kemungkinan terjadinya bahaya, dan meminimalisir daya rusak dari suatu bahaya yang tidak dapat di prediksi. (Achmad Andi Rif'an, 2012) Penataan Ruang Wilayah Berbasis Manajemen Bencana. Metode kualitatif deskriptif evaluative. mengidentifikasi penggunaan lahan, mengidentifikasi kawasan rawan bencana, memberikan arahan penataan ruang wilayah di Kabupaten Jember yang berbasis (Ati Yuniati, 2012) Peran Dinas Tata Kota Bandar Lampung Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Metode Pendekatan yuridis normatif dan empiris Mengetahui peran dari dinas tata kota Bandar Lampung dalam hal pengendalian Pemanfaatan tata ruang. Peran Dinas Tata Kota Bandar Lampung dalam pengendalian manfaat tata ruang ialah melakukan kegiatan pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan tata ruang ini dilakukan oleh Dinas Tata Kota Bandar Lampung pada saat ini di rasakan sudah cukup baik dengan kegiatan sebagaimana tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Kota Bandar Lampung tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota Bandar Lampung

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Dari ketiga penelitian tersebut terdapat beberapa persamaan yaitu membahas tentang suatu fungsi tata ruang dalam manajemen risiko bencana yang berfungsi untuk mencegah bahaya saat terjadinya bencana yang akan terjadi sewaktu-waktu.

Perbedaan dari ketiga penelitian tersebut ialah terletak pada lokasi, objek penelitian, serta metode penelitian yang berbeda. Pada penelitian kali ini penulis melakukan suatu penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya, yaitu 5opic yang menjadi fokus dalam penelitian ialah Optimalisasi Peran Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dalam Penanggulangan Bencana Alam di Kota Bandar Lampung. dengan tujuan mengetahui peran Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dalam penanggulangan bencana alam di Kota Bandar Lampung serta faktor yang menjadi penghambat dan mengetahui upaya yang akan dilakukan untuk menciptakan Kota Bandar Lampung yang berkelanjutan bebas bencana alam. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

Sedangkan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu pada penelitian Ati Widiati (2008) yang menjadi fokus pada penelitiannya yaitu peran dinas pariwisata dalam pengembangan sumber daya manusia dengan melakukan pembinaan, pendampingan dan penganggaran dari segi fasilitas dan juga sebagai koordinator, fasilitator, dan stimulator.

1.5. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian riset ini yaitu sebagai berikut :

1. Mengetahui optimalisasi terhadap peran yang telah dilakukan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam penanggulangan bencana alam di Kota Bandar Lampung
2. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan penanggulangan bencana alam di Kota Bandar Lampung
3. Mengetahui upaya yang akan dilakukan untuk menciptakan Kota Bandar Lampung yang berkelanjutan bebas bencana alam

II. METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Karena permasalahan berkaitan dengan manusia yang pada dasarnya bergantung pada pengamatan. Dengan demikian dapat disimpulkan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif merupakan pendekatan dengan melakukan penelitian secara utuh terhadap subjek penelitian dimana terdapat suatu peristiwa dimana peneliti merupakan instrumen kunci di dalam penelitian, kemudian hasil pendekatan dijelaskan dengan kata-kata tertulis pada data empiris yang diperoleh dan dalam pendekatan ini juga menekankan makna dari generalisasi. Maka peneliti dapat mendeskripsikan optimalisasi kawasan permukiman di Kota Bandar Lampung serta dapat mengetahui permasalahan yang ada dan dapat memberikan solusi atas permasalahan sesuai dengan data dan fakta yang ada. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi. Sedangkan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian serta kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Bandar Lampung adalah Ibukota Provinsi Lampung sebagai pusat pemerintah, politik, sosial, pendidikan dan kebudayaan serta merupakan pusat dari perekonomian di wilayah Provinsi Lampung. Kota Bandar Lampung adalah pusat pertumbuhan ekonomi terkemuka di bagian ujung Selatan Pulau Sumatera, dan sebagai pintu gerbang utama Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera sehingga Kota Bandar Lampung ini memiliki posisi yang strategis dan juga didukung dengan aksesibilitas yang tinggi. Kota Bandar Lampung dapat dituju dengan transportasi laut dari pelabuhan Bakauheni dan Pelabuhan Panjang, kemudian transportasi udara melalui Bandar Udara Branti yang memiliki jarak kurang lebih delapan belas kilometer dari Kota Bandar Lampung, serta melalui jalan raya Trans Sumatera. Kota Bandar Lampung juga memiliki obyek wisata dan menjadi daya tarik para

wisatawan nasional maupun internasional, seperti Way Kambas, Gunung Krakatau , dan lain sebagainya.

Setiap tahunnya jumlah penduduk di wilayah Kota Bandar Lampung selalu mengalami peningkatan baik pendatang maupun penduduk yang menetap. Baik itu untuk menunjang aktifitasnya maupun untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Sehingga, menyebabkan kebutuhan lahan perumahan dan kawasan permukiman selalu meningkat setiap tahun. Semakin banyaknya penduduk maka semakin diperlukan usaha yang maksimal bagi pemerintah dalam mengatasi permasalahan terhadap penanggulangan bencana alam yang terjadi di Kota Bandar Lampung. Karena tidak semua masyarakat berpartisipasi dalam mendukung kinerja pemerintah. Semakin banyaknya pembangunan juga menyebabkan Ruang Tata Hijau berkurang. Sehingga diperlukannya daya dukung yang kuat dalam bentuk regulasi dan partisipasi mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun Masyarakat dalam upaya mengurangi risiko bencana alam yang terjadi.

3.1 Tujuan

Tujuan dapat berbentuk maksimisasi atau minimisasi. Bentuk maksimisasi dapat digunakan jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan penerimaan, keuntungan, dan sejenisnya. Sedangkan bentuk minimisasi dapat dipilih jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan waktu, biaya, jarak, dan sejenisnya. Dalam penentuan tujuan ini harus memperhatikan apa yang diminimumkan atau maksimumkan.

Dalam menentukan kegiatan untuk bisa dilaksanakan secara optimal diperlukan tujuan yang jelas. Karena dengan tujuan yang jelas, rangkaian kegiatan dapat terlaksana secara baik, sehingga kegiatan tersebut dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (RPJMD) membuat target daerah Kota Bandar Lampung pada sektor perumahan dan kawasan permukiman khususnya dalam penanggulangan bencana alam. Dalam hal ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan pengendalian pemanfaatan ruang sebagai antisipasi (mitigasi) sebelum terjadinya bencana dengan 4 instrumen

3.2 Alternatif Keputusan

Pengambilan keputusan dihadapkan pada beberapa pilihan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Alternatif keputusan yang tersedia tentunya alternatif yang menggunakan sumberdaya terbatas yang dimiliki pengambil keputusan. Alternatif keputusan merupakan aktivitas atau kegiatan untuk mencapai tujuan

Saat memiliki tujuan ada sebuah kebijakan atau rangkaian kegiatan untuk melaksanakan dan mencapai tujuan tersebut dengan baik. Dimana dalam melaksanakan tujuan tidak serta merta berhasil tanpa adanya hambatan. Sehingga diperlukannya kebijakan dalam pengambilan keputusan yang baik. Pengambilan keputusan ialah suatu akhir dari proses pemikiran untuk menjawab tentang suatu masalah guna mengatasi masalah tersebut, dengan menentukan pilihan pada suatu alternative keputusan. Dalam pengambilan keputusan biasanya ada beberapa pilihan alternative agar lebih efisien dalam mencapai tujuan tersebut.

Analisis terhadap alternative keputusan yang di ambil oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu melalui kebijakan-kebijakan sesuai RPJMD 2021-2026. terdiri dari skala prioritas dan kesesuaian.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandar Lampung bersama Kementrian Agraria Tata Ruang memvoting daerah mana yang lebih rawan bencana banjir dengan memperhatikan sebab-akibatnya. sehingga daerah tersebut akan di dahulukan dalam pengembangan drainasenya. Begitu juga dengan program BSPS dengan memperhatikan skala prioritas mana yang lebih di utamakan dalam program bedah rumah tersebut.

Dalam kesesuaian kebijakan dari program BSPS ini yaitu, dengan cara pemerintah mendata lalu menganalisis apakah penerima bantuan program bedah rumah ini sesuai dengan syarat-syarat program tersebut. Seperti Program rumah layak huni apakah rumah tersebut memiliki surat tanah yang lengkap atau tidak.

3.3 Sumber daya

Sumberdaya merupakan suatu upaya pengorbanan yang harus dilakukan agar tujuan dapat diraih sesuai dengan yang sudah di tetapkan. Sumberdaya ini bersifat terbatas dalam ketersediaannya sehingga keterlibatannya dibutuhkan proses optimalisasi bagi para pelaksana. Agar sumber daya dapat digunakan secara maksimal.

Untuk mencapai suatu tujuan, banyak permasalahan yang dihadapi. Salah satunya sumber daya. Sehingga perlu adanya pembatasan sumber daya yang efisien agar tujuan tersebut dapat berjalan secara efektif. Sumber daya yang dibatasi biasanya ialah pada anggaran. Karena dalam menjalankan program kerja sering terhambat karena anggaran. Saat pandemi covid 19 yang terjadi di Indonesia mengakibatkan anggaran negara mengalami pengeluaran yang cukup besar, sehingga mengakibatkan refofusing anggaran.

Untuk tetap menjalankan program, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mencari solusi agar tetap berjalan dengan melakukan koordinasi kepada sketholders ke PUPR untuk melakukan usulan. Dan dari usulan tersebut, Pemerintah menyetujui bahwa program BSPS dan Drainasse tersebut tetap bisa berjalan dengan Dana Alokasi Khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat, tetapi dengan anggaran yang dibatasi sehingga program tersebut sesuai dengan Skala Prioritas.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Perbedaan temuan penelitian sebelumnya dengan temuan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu pada penelitian Ati Yuniati (2012) memiliki temuan pengendalian pemanfaatan ruang oleh Dinas Tata Ruang hanya dalam hal pengendalian pemanfaatan tata ruang dengan metode pendekatan yuridis normatif dan empiris. Peran Dinas Tata Kota Bandar Lampung dalam pengendalian manfaat tata ruang ialah melakukan kegiatan pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan tata ruang ini dilakukan oleh Dinas Tata Kota Bandar Lampung pada saat ini di rasakan sudah cukup baik dengan kegiatan sebagaimana tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Kota Bandar Lampung tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota Bandar Lampung.

Sedangkan penulis berfokus dalam hal peran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandar Lampung tentang penanganan bencana dengan dasar penataan ruang wilayah permukiman sehingga dapat mencegah terjadinya bencana lebih dini dengan antisipasi wilayah permukiman di wilayah rawan bencana.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data yang penulis lakukan selama penelitian di lapangan, serta mengacu pada Optimalisasi Peran Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dalam Penanggulangan Bencana Alam Kota Bandar Lampung, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Peran Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dalam Penanggulangan Bencana Alam Kota Bandar Lampung sudah optimal dalam teori Optimalisasi menurut Machfud Sidik dikarenakan dalam semua indicator sudah di jalankan secara optimal oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman.
2. Faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan penanggulangan bencana alam di Kota Bandar Lampung pada bidang penataan ruang ini terbagi menjadi dua yaitu bidang penataan

ruang pola ruang dan bidang penataan ruang (RTH). Bidang penataan ruang pola ruang permasalahannya yaitu belum optimalnya dokumen RTRW serta masyarakat yang belum memahami aturan terkait RTRW, bangunan yang tidak sesuai dan juga pelanggaran terhadap ketentuan teknis RTRW,

3. Upaya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandar Lampung karena berdasarkan dari hasil penelitian dan wawancara yang telah penulis lakukan, Peran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam penanggulangan bencana alam khususnya dalam antisipasi (mitigasi) dengan optimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kebijakan serta program yang telah dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Program yang telah dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman antara lain Bedah rumah layak huni, Sosialisasi dan Pengembangan drainase, Serta kebijakan dengan melakukan penertiban dan pengendalian terhadap bangunan kumuh yang tidak sesuai zonasi.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu dinas saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Machmud Sidik

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan program kampung literasi di Kota Bandar Lampung untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan Skripsi ini,ucapan terimakasih disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Dr. Hadi Prabowo, MM selaku Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
2. Bapak Dr. Drs. Udaya Madjid, M.Pd selaku Dekan Fakultas Perlindungan Masyarakat.
3. Bapak Sutiyo, S.STP, M.Si, Ph.D selaku Ketua Program Studi Manajemen Keamanan Dan Keselamatan Publik.
4. Bapak Dr. Widodo Sigit Pudjianto, SH, MH (Dosen Pembimbing I); dan Bapak Dr. Drs. H. Lalu Moh. Danial, MT (Dosen Pembimbing II) yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan serta motivasi selama proses penyusunan skripsi serta Dosen Penelaah yang telah memberikan arahan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan tugas akhir pendidikan di IPDN
5. Pemerintah Kota Bandar Lampung, terutama kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Kepala BAPPEDA.
6. Segenap Dosen Pengajar, Pelatih, dan Pengasuh, serta seluruh Civitas Akademika atas bimbingan dan ilmu yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan di IPDN.
7. Kakak-kakakku tercinta dan tersayang Desfiati Arieska Setiawan, Anjar Rizky Setiawan, dan adikku Nailu Syaadah Setiawan yang selalu mendukung dan memberikan semangat dalam menjalankan kehidupan selama praja. Serta merupakan motivasi penulis untuk mencapai keberhasilan dan cita-cita yang penulis miliki.
8. Seseorang yang saya sayangi, yang telah hadir dan menjadi lembaran cerita pendidikan saya serta sabar dalam mengajarkan banyak hal, Yhos Putra Perdana
9. Sahabat terbaik saya sedari kecil Izdihar Khani yang selalu hadir dalam suka dan duka
10. Sahabat kuliah saya di Institut Teknologi Sumatera Angkatan 2017 Tri Sarifah, Ratu Desti, Muhammad Adrio, Ahmad Irfan, dan Gustiana yang selalu ada dan meluangkan waktunya untuk saya hingga saat ini

11. Sahabat saya yang hadir dari zaman CAPRA hingga saat ini selalu ada dan mewarnai hari-hari saya dan selalu sabar Dwi Krismayanti, Hafizhah Firjakhansa, dan Devi Farah
12. Sahabat saya yang selalu membantu serta saling support Nabillah, Fildzah, Syahira, Tri Arsa, St Indah.
13. Saudara Regional Nusa Tenggara Barat khususnya Saudara Wisma E-Bawah yang sudah membantu saya dalam mengerjakan skripsi ini serta mengajarkan indahnya sebuah kerjasama dan kebersamaan. Terimakasih karena sudah bisa bertahan dan saling menguatkan selama menjalani pendidikan dari madya sampai awal praja utama di Regional.
14. Saudara Kontingen Lampung terkhusus angkatan XXIX yang telah menjadi keluarga baru dengan segala duka cita yang telah dialami, serta adik-adikku angkatan XXX,XXXI,XXXII.
15. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat berterimakasih kepada semua pihak yang memberikan saran dan kritik demi perbaikan Skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi Almater maupun Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Susilo, Rachmawati , dan Rachmawati Ayu. 2018. Pengurangan Resiko Bencana. Jakarta , Graha Cendekia**
- Nurjanah dkk, Manajemen Bencana, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal 10**
- Dinukil dari UU No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.**
- Astriani, N. (2015). Implikasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau**
- Tim Prima Pena, 2015. Kamus Besar Bahasa Indonesia , Jakarta. Gita Media Press.**
- Hotniar Siringoringo, 2005. Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi, Yogyakarta: Graha Ilmu.**
- Fitriana, Elvie Dyah. Dkk. 2013. Implementasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah Pembangunan Kota Berkelanjutan Studi di Kabupaten Magetan.**
- Darmawati. Dkk. 2015. Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (Rtrw) dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan.**
- Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, A. (2014).. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents.**
- Pendekatan, A., & Penelitian, M. (2013). Angki Aulia Muhammad, 2013 Kesadaran Hukum Masyarakat Kampung Mahmud Untuk Memiliki Sertifikat Atas Hak Ulayat Universitas Pendidikan Indonesia**
- Subarsono. 2013. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.**
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta**
- Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian (Jakarta: Rajawali, 1987), h. 93.**
- Sunarti, S. (2019). Buku Ajar Perumahan dan Permukiman.**
- Tachjan, 2006. Implementasi kebijakan Publik**
- Taufik Ahmad. 2015. Peningkatan Pemahaman Perangkat Kelurahan dan Kecamatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kajian di Kecamatan Tembalang Kota Semarang.**
- Wahid, Yunus. Dkk. Penegakan Hukum Lingkungan di Sektor Kehutanan (Studi Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Sinjai, Sulawesi-Selatan).**
- Winarsih, Oeri, Dkk. 2016. Analisis Perencanaan, Pengendalian, Penetapan Keputusan**

Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi Empiris di Dinas Pasar kota Semarang).
Yunus, Hadi Sabari. 2005. Manajemen Kota Perspektif Spasial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea IV
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 1 tentang Penanggulangan Bencana
Undang-Undang No 26 Tahun 2007 Pasal 3 tentang Penataan Ruang
Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2008 Pasal 4 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana
Peraturan Pemerintah No 68 Tahun 2010 Pasal 2 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran
Masyarakat Dalam Penataan Ruang
Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Tahun 2011-2030
Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas
Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung
Penataan Ruang Di Jawa Barat. FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum, 8(2), 242–254.
<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no2.300>
Heryana, A. (2020). Pengertian Dan Jenis Bencana. Researchgate.Net, January, 1–4.
https://www.researchgate.net/publication/338537206_Pengertian_dan_Jenis_Bencana
<https://bnpb.go.id/uploads/migration/pubs/4.pdf>
<https://petatematikindo.wordpress.com/2015/02/22/administrasi-kota-bandar-lampung/>
<http://library.binus.ac.id/eColls/eThesidoc/Bab2/2013-1-00694-TI%20Bab2001.pdf>
<https://artikelsiana.com/Pengertian-peran-fungsi-jenis-peran-ciri-syarat-para-Ahli/>
<https://teropong.id/pengertian-tata-ruang-klasifikasi-asas-dan-tujuan-penataan-ruang/>
http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/183/5/118510054_file5.pdf
<https://intanniar.blogspot.com/2010/10/pengukuran-variabel-operasionalisasi.html>
<https://www.unisdr.org/we/inform/terminology>
<https://donipengalaman9.wordpress.com/2012/04/01/240/>
<https://perkim.id/pofil-pkp/profil-kabupaten-kota/profil-perumahan-dan-kawasan-permukiman-kota-bandar-lampung/>
https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_995e7399c0_BAB%20IIBAB%202.pdf
http://repo.itera.ac.id/assets/file_upload/SB2009110019/23116017_3_060901.pdf